

Penerapan KIR Online Di Kota Pekanbaru

Suryandi Amar Yusron¹ Evi Zubaidah²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
suryadiamaryusron@student.uir.ac.id evizubaidah@soc.uir.ac.id

Received : April 22, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

The aim of this research is to determine the implementation of online KIR in Pekanbaru and its obstacles. The method used is a qualitative method; informants such as the head and employees of the Motor Vehicle Test UPT, as well as the KIR test organizer community. Data collection methods are interviews, observation and documentation. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of online KIR in Pekanbaru via Smart Card has not been fully achieved. The UPT PKB Transportation Service has communicated updates to the Blu-E Smart Card via social media, banners and direct appeals to the public taking test drives, but the public has not fully accepted the update. Obstacles in implementing online KIR in Pekanbaru include the vehicle driving inspection process which causes inconvenience for the driver/owner of the vehicle being inspected and the vehicle owner is sometimes absent or intentionally absent. do not shirk responsibility for vehicle technical inspections, Riau electricity crisis, vehicle test transfers without notification.

Key Words : Implementation, KIR, Online

Abstrak

Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan KIR online di Pekanbaru dan hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif; informan seperti kepala dan pegawai UPT Uji Kendaraan Bermotor, serta masyarakat penyelenggara uji KIR. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KIR online di Pekanbaru melalui Smart Card belum sepenuhnya tercapai. UPT PKB Dinas Perhubungan telah mengkomunikasikan pembaruan Blu-E Smart Card melalui media sosial, spanduk, serta imbauan langsung kepada masyarakat yang melakukan test drive, namun masyarakat belum sepenuhnya menerima pembaruan tersebut. Kendala pelaksanaan KIR online di Pekanbaru antara lain pada proses pemeriksaan pengendaraan kendaraan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengemudi/pemilik kendaraan yang diperiksa dan pemilik kendaraan terkadang mangkir atau sengaja tidak mengelak dari tanggung jawab pemeriksaan teknis kendaraan, krisis kelistrikan Riau, mutasi uji kendaraan tanpa pemberitahuan.

Key Words : 1 Penerapan, KIR, Online

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan transportasi atau pengangkutan merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat Indonesia. Dari era kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) hingga modern, transportasi selalu mendukung dan menjadi salah satunya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia tercermin dari beberapa faktor, seperti keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan perairan, sebagian besar terdiri dari lautan, sungai, dan danau, yang memungkinkan transportasi dilakukan melalui darat, air, dan udara. Jangkauan seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini Dinas Angkutan Kota Pekanbaru berhak melakukan pemeriksaan kesesuaian pada setiap kendaraan yang ada di Pekanbaru dan setiap kendaraan harus lulus uji kelayakan. Selain investasi anggaran tahunan ke kas daerah, dampak pengawasan dan pemeriksaan juga sangat penting, seperti terciptanya ketertiban sosial, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas, penurunan angka kecelakaan di wilayah, dan peningkatan infrastruktur. rambu-rambu jalan yang digunakan oleh pengguna jalan dll. Telah dijelaskan bahwa pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 "Tentang Lalu Lintas dan Angkutan". Pemerintah harus memantau apakah kendaraan penumpang dan barang (angkutan umum, bus, truk) layak untuk lalu lintas jalan raya. Pemeriksaan yang dilakukan berupa uji KIR (berkala).

Pengujian kendaraan bermotor sendiri merupakan serangkaian pengujian dan pengecekan terhadap bagian dan komponen kendaraan, termasuk truk, untuk memenuhi persyaratan teknis dan lalu lintas. Anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat kepada Kementerian Perhubungan sebesar 112 miliar rupiah, dengan sekitar 76 miliar rupiah untuk kegiatan lain seperti tagihan listrik untuk lampu jalan, dan kegiatan lain seperti tarif bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dan pembayaran gaji, dan juga tenaga kerja harian gratis (THL).). Jumlah kendaraan yang diperiksa di UPTD PKB Dinas Perhubungan Pekanbaru sebanyak 100-150 kendaraan per hari. Tabel berikut menunjukkan jumlah kendaraan yang menjalani pengujian berkala aktif dan pasif di Dinas Angkutan Kota Pekanbaru pada tahun 2021-2022.

Tabel 1

Jumlah Kendaraan Yang Melaksanakan Uji Berkala Aktif Dan Non Aktif Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022

No	Jenis Kendaraan	2021			2022		
		Aktif	Non Aktif	Jumlah	Aktif	Non Aktif	Jumlah
1.	AJ DP	-	-	-	-	-	-
2.	Taksi	172	1.053	1.255	70	1.152	1.222
3.	Oplet	20	1.822	1.842	12	1.830	1.842
4.	Rental	130	1.517	1.647	129	1.526	1.655
5.	Oto Bis	796	2.452	3.248	961	2.414	3.375
6.	Mini Bus	308	2.509	2.817	309	2.534	2.843
7.	Pick UP	21.536	32.635	54.171	1.865	37.314	56.179
8.	Truk	6.399	22.361	28.760	6.938	22.310	29.248
9.	Truk	306	6.255	6.561	2.045	4.540	6.585

10	Tanki	231	1.054	1.285	350	962	1.312
11	Tanki	155	494	649	138	509	647
12	Trucror	144	534	678	236	465	701
13	Kereta	69	502	571	125	456	581
14	Kereta	-	5	5	-	4	4
15	Kendaraan	384	385	769	370	411	781
	Jumlah	30.650	73.578	104.228	30.548	76.427	106.975

Sumber: Data UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2023

Pada tahun 2021 hingga tahun 2022, peningkatan jumlah kendaraan barang tidak aktif disebabkan karena kendaraan tersebut tidak digunakan, terdapat kendaraan yang sedang duduk (rusak berat), dan terdapat kendaraan yang telah dipindahkan namun tidak dilaporkan. Pemilik kendaraan harus terlebih dahulu melaporkan dan mencabut berkasnya, dan alasan lainnya mungkin karena kurangnya kendali atas kendaraannya selama penggerebekan di lokasi. dapat menjalankan tes SIM.

Tes rutin yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (PP LLAJ) dan dibahas secara mendalam dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. PM Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB). Buku KIR mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengoperasian kendaraan umum maupun pribadi. Fungsi utama buku ini adalah untuk menjamin keselamatan kendaraan untuk kegiatan niaga dan bisnis. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini menuntut seluruh pelayanan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi yang inovatif, seperti kartu pintar yang menggantikan fungsi buku KIR. Pada tanggal 20 Juli 2020, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengganti buku surat keterangan uji kendaraan (PKB) dengan kartu pintar Blue-E yang menjadi bukti lolos uji elektronik.

Anda dapat melihat di bawah ini aplikasi online untuk mengelola tes KIR secara online.

Gambar 1.

Aplikasi Untuk Pengurusan Uji Kir Secara Online



Sumber: Uji Kir Online Pekanbaru, 2023

Penerapan Smart Card ini berdasarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP 1742/AJ 502/DRJD/2020 untuk penerbitan pemeriksaan berkala Kendaraan Bermotor secara elektronik. Kartu pintar ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Formulir ini seperti e-KTP. Ini hanya tersedia dari Kementerian Jalan dan Transportasi berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Kartu pintar Blue-E terdiri dari dua sertifikat kelulusan, dua stiker holografik dengan kode QR yang ditempel di kaca depan mobil, dan satu kartu pintar berteknologi NFC. Ada beberapa data yang tertera pada smart card, seperti:

1. Identifikasi kendaraan
2. Gambar fisik 4 (empat) sisi kendaraan
3. Data hasil tes reguler disimpan dalam bentuk digital.

Informasi ini dapat diakses dengan memindai kode QR pada stiker hologram dan memasang kartu pintar ke smartphone berkemampuan NFC.

Konsep smart card digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berbasis teknologi informasi, sehingga tercipta pemerintahan yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, yang pada akhirnya berdampak pada kemudahan akses informasi warga negara. Selain itu, penggantian buku KIR dengan kartu pintar juga mengurangi penipuan yang sering terjadi saat pengisian buku KIR, karena kartu pintar ini memiliki barcode. Dengan menggunakan Blue-E Smart Card, Anda dapat terhindar dari hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari biaya uji kendaraan. Telah terjadi perubahan tarif pajak kartu pintar Blue-E sejalan dengan Peraturan Daerah 9 (Perda) tahun 2018 dan Peraturan Walikota 65 (Pervaco) tahun 2020. Artinya, pembayaran biaya KIR tidak lagi seimbang. Sebelumnya biaya KIR sebesar Rp. 37.000 untuk semua jenis kendaraan, dan pada Blue-E pajaknya dibayar berdasarkan berat kotor dan berat kendaraan. Upaya pemerintah dalam pengembangan transportasi ditujukan untuk mengatur kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan dan menciptakan serangkaian peraturan dan kebijakan agar masyarakat memperhatikan dan mengikuti keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, namun pada kenyataannya justru hal tersebut kebijakan masih banyak masyarakat khususnya pengemudi dan pemilik kendaraan lanjut usia yang kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi sehingga program yang dibuat sebagai pembuktian kelulusan tes elektronik masih belum maksimal dan potensi pejabat yang tidak jujur akan memalsukan buku KIR dan membantu pihak tertentu untuk mendapatkan surat lalu lintas secara tidak sah. Oleh karena itu, kami berharap dengan inisiatif baru kartu pintar, penipuan dalam proses otorisasi dapat berkurang. Pada dasarnya tindakan tersebut pada akhirnya akan berdampak pada keselamatan pengguna angkutan dan pengguna jalan lainnya.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan dalam penelitian ini adalah (Luis Vigo Kasmedi, 2020), (Rani Raztiani, 2022), (Viktoria Ndia, 2019) perbedaan penelitiannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Pekanbaru. Kemudian jenis aplikasi layanannya penelitian ini dilakukan pada Blu-E (Buku Lulus Tes Elektronik) melalui Smart Card.

Tinjauan Pustaka

Secara epistemologis, penerapan dapat diartikan sebagai upaya menerapkan sesuatu yang baru untuk mencapai suatu hasil. Pada prinsipnya implementasi adalah suatu cara yang

digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003: 158). Metode adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan menerapkan berbagai tindakan yang memaksakan sesuatu pada organisasi Anda.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah/swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan (Wahab, 2016:65).

Penerapan menurut pengertian ini adalah penerapan hasil pekerjaan yang diperoleh dengan cara yang praktis bagi masyarakat. Pengertiannya adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok masyarakat dan swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan (Agustino, 2006: 139).

Penerapan e-governance memerlukan perubahan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat. World Bank Group dalam Indrajit (2002:3) mendefinisikan pengertian e-Government sebagai "E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi (broadband, Internet, mobile computing, dan lain-lain) oleh lembaga pemerintah untuk mentransformasikan hubungan antar warga negara. , dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. E-governance mengacu pada penggunaan teknologi informasi (jaringan area luas, Internet, komputasi mobile, dll.) oleh lembaga pemerintah yang mampu berkomunikasi dengan warga negara, perusahaan, dan organisasi lainnya.

Pemanfaatan e-governance merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kapasitas negara sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan kapasitas PNS dalam penerapan e-governance terus dikembangkan agar mampu bersaing dalam persaingan global.

Elemen keberhasilan penerapan e-governance Organisasi pemerintah dapat secara serius dan hati-hati menerapkan konsep digitalisasi dalam pelayanan publik. Hasil kasjian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit,2004) mengidentifikasi tiga elemen yang harus dikuasai dan ditanggapi dengan serius agar implementasi e-Government berhasil: dukungan, kapasitas, dan nilai. Berikut penjelasannya:

- a. Unsur pendukung: Adanya keinginan (tujuan) atau kemauan politik pemerintah dan pejabat politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government. Berikut arti dukungan:
 1. Sistem e-Government harus dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam memenuhi visi dan misi negara, dan sistem ini harus diutamakan sambil mempertimbangkan kunci keberhasilan lainnya;
 2. Untuk menciptakan konsep e-Government ini, alokasikan beberapa sumber daya (manusia, keuangan, energi, waktu, informasi, dll.) di tingkat lembaga pemerintah (misalnya, memiliki undang-undang dan peraturan khusus, penugasan fungsi tertentu, dll.). Organisasi seperti kedutaan elektronik, yang tanggung jawab utamanya adalah menyiapkan aturan kerja sama dengan sektor swasta); Kemudian
 3. Sosialisasi konsep e-governance kepada seluruh birokrat dan seluruh masyarakat secara seragam, berkesinambungan, konsisten dan menyeluruh melalui berbagai metode promosi.

b. Elemen kekuatan: Elemen capacity merupakan kemampuan atau unsur kewenangan pemerintah daerah untuk mewujudkan impian e-Governmentnya. Berkaitan dengan unsur tersebut, pemerintah harus mempunyai tiga hal, yaitu:

1. Apakah terdapat sumber daya yang cukup untuk melaksanakan inisiatif bersama e-Government, khususnya inisiatif yang berkaitan dengan sumber daya keuangan;
2. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, karena fasilitas ini merupakan 50 persen kunci keberhasilan implementasi konsep e-Government; Kemudian.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk memastikan penerapan e-Government memenuhi prinsip manfaat yang diharapkan.

C. Elemen nilai (manfaat): Elemen pertama dan kedua adalah dari sisi supply (pemerintah ke penyedia layanan), dan yang ketiga (Value) dari sisi permintaan. Berbagai inisiatif e-Government tidak ada gunanya jika tidak dipandang bermanfaat bagi salah satu pihak. Salah satunya penerapan konsep ini. Besar kecilnya manfaat yang diperoleh dari e-Government ditentukan oleh masyarakat dan pihak yang mempunyai kepentingan (demand side), bukan pemerintah itu sendiri. Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam memilih prioritas. Untuk semua jenis aplikasi e-Government. Pembangunan harus diprioritaskan untuk memberikan nilai nyata (manfaat) kepada masyarakat.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2016: 4-5), penelitian kualitatif adalah suatu jenis metode yang menggambarkan, menyelidiki, dan memahami makna-makna yang ditafsirkan oleh sejumlah individu atau kelompok orang dalam permasalahan sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya yang signifikan seperti pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data spesifik dari partisipan, analisis secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna data.

Penelitian ini dilakukan pada pengguna kendaraan yang wajib uji KIR dan belum melakukan uji KIR. Lokasi penelitian ini di Dishub Kota Pekanbaru. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan pengelolaan uji teknis dan pendataan kendaraan merupakan hal yang penting untuk keselamatan dan keamanan pengemudi atau penumpang.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung kepada narasumber dengan acuan pedoman wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang lain atau lewat dokumen, peneliti menggunakan jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian serta berita online yang terkait yang dijadikan sebagai sumber sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara karena melihat pada proses mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya sehingga bisa melihat pengaruh penelitian ini.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Teknisi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang,

Pengguna kendaraan yang melakukan uji KIR, Pengguna kendaraan yang tidak melakukan uji KIR.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi menurut Elemen keberhasilan penerapan e-governance Organisasi pemerintah Hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit,2004) sebagai berikut:

1. Elemen Support

a) Disepakatinya kerangka e-Government

Disepakati bahwa sistem e-Government adalah salah satu kunci keberhasilan visi dan misi negara, dan sistem ini harus dianggap sangat penting seiring dengan pertimbangan kunci keberhasilan lainnya. Ide inovatif adalah pemikiran untuk memunculkan ide baru untuk memperoleh perbaikan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menerapkan inovasi berupa kartu pintar Blue-E yang menjadi bukti lolos tes elektronik.. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tidak semua masyarakat dan pemilik kendaraan memahami cara pengurusan KIR secara online, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperoleh pengelola sehingga harus banyak bertanya mengenai syarat dan ketentuan penggunaan. . itu sedang diproses.

b) Dialokasinya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tengah mendalami tes Kir online yang dilakukan Dinas Perhubungan sebanyak 3 kali dalam sebulan dan memberikan denda kepada pemilik kendaraan barang yang telah membayar pajak sebanyak 1 kali dalam 6 bulan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, terlihat jelas bahwa reformasi tersebut telah dilaksanakan oleh UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. Masyarakat mengetahui adanya penerapan inovas baru yaitu konversi buku KIR menjadi Blue-E Smart Card

c) Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh

Konsep e-governance disebarluaskan melalui berbagai sarana publisitas yang simpatik secara lancar, berkesinambungan, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh birokrat dan masyarakat luas.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan yang dilakukan untuk kepentingan pengguna UPT PKB dan Dinas Transportasi Biru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat diterima oleh masyarakat. Layanan E Smart Card sendiri. Saluran komunikasi seperti poster dan spanduk juga banyak dipasang di wilayah setempat guna menyadarkan masyarakat akan alur reformasi ini.

UPT PKB Pekanbaru memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai perubahan yang ada. Berbagai saluran komunikasi diterapkan, seperti pemasangan spanduk dan spanduk di tempat tes, media sosial, radio, hingga komunikasi langsung dengan masyarakat saat masyarakat melakukan test drive mobilnya. Dengan adanya inovasi

baru, secara umum banyak orang mempunyai perasaan positif dan negatif terhadap perubahan tersebut.

2. Elemen Capacity

a) Ketersediaan sumber daya yang cukup

Dari hasil observasi diketahui sumber daya (pegawai) yang melakukan pelayanan pengujian kendaraan masih kurang, namun masih sesuai dengan keterampilannya, dimana setiap pegawai dibagi menjadi 3 (tiga) lini yaitu kendaraan kecil, kendaraan besar, dan kendaraan baru. , staf saat ini sudah mencukupi. Di sini staf bertindak sebagai acuan utama yang menjadi dasar tindakan atau tindakan selanjutnya. Pengetahuan kerja bukan hanya kesadaran akan upaya menyelesaikan pekerjaan, melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembuatan laporan yang tepat, dan meningkatkan hasil kerja, tetapi juga upaya pemeliharaan gedung dan prasarana.

b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai

Hasil observasi menunjukkan bahwa sumber daya tersebut terkendala oleh kurangnya perangkat lunak dan peralatan pendukung Tes KIR online, serta perangkat lunak pendukung tes online yang kurang dan perangkat lunak kritis. Peralatan seperti tablet/komputer dan software untuk kelangsungan online Dukungan pengujian online.

c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, kartu pintar Blue-E yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan dan dikelola oleh UPT PKB Dinas Perhubungan Pekanbaru ini sesuai dengan perkembangan yang ada dan memudahkan pelayanan publik. Dengan sistem berbasis komputer online, informasi kendaraan dapat disimpan dan diambil dengan mudah. Dari pengamatan saya terhadap ide-ide inovatif, pemerintah telah menerapkan inovasi tersebut dengan baik dan diterapkan di UPT PKB Pelayanan Angkutan Kota Pekanbaru.

3. Elemen Value (Manfaat)

a) Alokasi anggaran

Berdasarkan observasi peneliti industri, disimpulkan bahwa Kementerian Perhubungan dan Komunikasi melakukan kegiatan pengambilan keputusan sesuai dengan tata cara pengujian kendaraan bermotor secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Jalan Nomor 133 Tahun 2015.

b) Pemanfaatan terhadap infrastruktur Teknologi informasi yang tersedia

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, menurut saya penerapan ini akan sangat membantu operasional Dinas Perhubungan, karena semua sistem yang digunakan berbasis online dan cepat. Pada saat ini, setiap orang sangat membutuhkan pelayanan yang efisien dan efektif. Semua data mudah dimasukkan dan mudah ditemukan. Proses pengujiannya juga cepat. Masyarakat dan Dinas Perhubungan benar-benar bersinergi dalam menerapkan inovasi tersebut, dan partisipasi masyarakat sangat terlihat pada saat Dinas Perhubungan melakukan uji coba kendaraannya di UPT PKB. Banyak masyarakat yang datang ke UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk test drive kendaraannya dan menukarkan buku KIRnya dengan kartu pintar Blu-E

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan indikator elemen elemen keberhasilan penerapan e-governance Organisasi pemerintah sebagai berikut:

1. Indikator Elemen Support disimpulkan UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah memberikan informasi yang jelas dan akurat terhadap perubahan yang ada. Dengan beragam saluran komunikasi yang dilakukan seperti, pemasangan spanduk dan banner dikawan pengujian, melalu media sosial, melalui radio, dan melalui penyampaian langsung kepada masyarakat saat masyarakat mengujikan kendaraannya. Dengan adanya inovasi baru pada umum banyak masyarakat yang pro dan kontra dengan adanya perubahan, sekecil apapun itu suatu perubahannya.
2. Indikator Elemen Capacity disimpulkan bahwa dalam sumber daya ini yang menjadi hambatan adalah dimana masih kurangnya software dan peralatan penunjang program Uji KIR online dimana software penunjang pengujian secara online masih belum memadai dimana software tersebut sangatlah penting untuk keberlangsungan secara online, peralatan seperti tablet / PC dan software penunjang pengujian online relatif mahal sehingga dalam penambahannya perlu waktu yang lama dalam penganggaran dana.
3. Indikator Elemen Value masyarakat sangat berpartisipasi dengan adanya inovasi ini dan telah menggunakannya. Masyarakat berusaha untuk aktif dalam penyeleenggaran inovasi ini dengan tetap mengikuti peraturan yang telah dibuat. Dengan adanya program online ini dapat membantu mempermudah masyarakat dalam pengurusan KIR, namun yang dikeluhkan masyarakat tidak semua masyarakat yang tanggap dalam mengaplikasiprogram ini secara online.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Abidin, Z.S., 2002, Kebijakan Publik, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. PT. Rineka Cipta: Jakarta. Gaspersz, V. 1997. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa.
- Dwiyanto. Agus, 2009. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada. University Press.
- Dwijowijoto, R.N, 2008, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Halvorsen, T. 2005. On The Differences Between Public and Private Sector. Innovation. Oslo: Publin Report.
- Ibrahim Jimmy Mohamad, 2004, Prospek Otonomi Daerah; Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang Lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, Cetakan I, Dahara Prize, Semarang
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.

- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.

- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.

- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.

- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. E-Government in action. Yogyakarta: Andi Offset.
- Keban, Yermias T, 2009. Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia. *Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi IV*.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, "Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Moenir. A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Munaf, Yusri, 2016. Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.
- Nazir, Moh. 2010. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta
- Ndraha, Taqliziduhu, 1997, Pembangunan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurmandi Achmad, 2006, Manajemen Perkotaan Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas, Penerbit Jusuf Kalla School of Government, Yogyakarta.
- Nyimas Dwi Koryati;dkk. 2005. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta : YPAPI
- Purnama, I. Labuhanbatu. 2020. Pengantar Teknologi Informasi. Universitas Labuhanbatu. Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai. Pustaka.
- Rasyid Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.
- Robi Cahyadi Kurniawan, 2013. Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Fiat Justisia, Universitas Lampung, Vol. 10.
- Robbins, Stephen P & Mary Coulter. 2010. Manajemen Jilid 1/ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter diterjemahkan oleh Bob Sabran, Wibi Hardani. -Ed.10, Cet13-.
- Sangkala. 2014. Innovative Governance Konsep dan aplikasi. Capiya Publishing, Surabaya.
- Sedarmayanti. 2004. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama
- Solly. M. Lubis. 2007. Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju.

- Suaedi, Falih Dan Wardiyanto, Bintoro (eds). 2010. Revitalisasi Administrasi. Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, Y. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-. LAN Press
- Syafie, Inu Kencana, 2005. Ilmu Pemerintatym (edisi revisi). Mondar Maju, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi). Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.
- Wibawa, Samodra. 2009. Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta : Graha Ilmu.